

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, semakin bertambah pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Setiap manusia berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dengan berbagai cara. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia ada yang berperan sebagai pengusaha ada pula yang berperan sebagai pekerja. Manusia sebagai pekerja dapat dibedakan menjadi pekerja PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Swasta, Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak maupun Pegawai Outsourcing / Pekerja Outsourcing.

Pekerja Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan penempatan kerja di area kerja perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing.

Pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem outsourcing menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem dimana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pelaksanaan sistem outsourcing berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pada ayat (7) bahwa hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yaitu diantaranya terdapat ketentuan dalam ayat (4) dimana perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja dengan sistem outsourcing tidak berhak atas jenjang karir, bahkan setelah perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pekerja tidak berhak pula atas uang pesangon yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja setelah bekerja selama minimal 3 bulan di sebuah perusahaan pemberi kerja.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemberlakuan sistem outsourcing sebenarnya kurang dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin pesat. Namun masyarakat masa kini tidak dapat serta merta memilih pekerjaan lain dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui lebih dalam

mengenai sistem outsourcing, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA OUTSOURCING”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen?
2. Bagaimana kesesuaian antara perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing PT. Makmur Jaya Sragen dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika dalam perjanjian outsourcing tersebut dilanggar oleh salah satu pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen?
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika perjanjian outsourcing dilanggar oleh salah satu pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, agar lebih mengetahui mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen yang dalam hal ini bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat

mengenai bidang perjanjian outsourcing yang merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu juga memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian outsourcing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai tanggung jawab hukum pelaksanaan perjanjian kerja sistem outsourcing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian - penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat

ilmiah.¹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data setelah diteliti mungkin tentang konstruksi hukum dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain terdiri dari:

¹ Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan huku yang diperoleh dari literatur atau buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya².

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³ dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di PT. Makmur Jaya Sragen.

² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 117

³ *Ibid*, hal. 30

2) Subyek Penelitian

Pihak terkait dalam perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen adalah pekerja outsourcing dan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing dalam hal ini yaitu PT. Makmur Jaya Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara:

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, yakni pekerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik bertanya langsung

kepada pihak terkait, yakni pekerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang perjanjian kerja sistem outsourcing dan digabungkan dengan wawancara di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian Outsourcing

- B. Pengertian Pihak-Pihak dalam Perjanjian Outsourcing
- C. Perjanjian antara Pihak-Pihak dalam Melakukan Pekerjaan Outsourcing
- D. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Outsourcing
- E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Outsourcing
- F. Peraturan yang Berlaku Mengenai Perjanjian Outsourcing
- G. Tanggung Jawab Hukum Mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- H. Berakhirnya Perjanjian Outsourcing

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen.
2. Kesesuaian Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan Aturan yang Terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Tanggung Jawab Hukum Jika Perjanjian Outsourcing Dilanggar oleh Salah Satu Pihak

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen.

2. Kesesuaian Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan Aturan yang Terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
3. Tanggung Jawab Hukum Jika Perjanjian Outsourcing Dilanggar oleh Salah Satu Pihak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA